

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam konteks Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020, kekuatan politik, baik dalam bentuk partai politik, kelompok ekonomi, birokrasi, maupun praktik money politics, memainkan peran krusial dalam menentukan hasil pemilihan. Partai politik seperti PDIP memiliki peran penting dalam membentuk koalisi dan memobilisasi dukungan sehingga muncul aksi borong partai, sementara kelompok ekonomi memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk kampanye. Birokrasi, meskipun seharusnya netral, terkadang dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan. Praktik money politics juga menunjukkan adanya tantangan serius terhadap proses demokrasi, dengan pemberian insentif materiil yang mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam konteks ini, teori klientelisme elektoral relevan untuk menjelaskan bagaimana politikus memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk memperoleh dukungan politik. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal di Humbang Hasundutan, di mana kekuatan politik berinteraksi dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan politik masing-masing, baik untuk memenangkan pemilihan maupun untuk mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi pada Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan penting dalam konteks demokratisasi lokal. Meskipun hanya ada satu calon yang mencalonkan diri, proses ini tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan tahapan

seleksi yang diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, termasuk kampanye dan pemungutan suara. Meskipun masyarakat memiliki satu pilihan, mereka tetap memiliki hak untuk golput sebagai bentuk penolakan. Namun secara substansi, Pilkada ini menunjukkan kekurangan dalam prinsip-prinsip demokrasi seperti terbatasnya pilihan calon, monopoli kekuasaan, money politics, kurang transparansi, dan partisipasi masyarakat rendah. Perbaikan diperlukan melalui reformasi sistem politik, peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang adil, dan pengawasan ketat pada semua tahapan Pilkada. Meskipun kontroversial, Pilkada dengan calon tunggal di Humbang Hasundutan secara prosedural dapat dianggap demokratis karena mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum, penting untuk memastikan legitimasi pemimpin terpilih dalam melayani masyarakat dengan baik.

#### **4.2 Saran**

Saran dari kesimpulan ini adalah yang pertama, perlu adanya langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh negatif kekuatan politik yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Ini termasuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye, memperkuat peraturan yang mengatur kontribusi keuangan dari kelompok ekonomi, serta menguatkan peran lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi dan menegakkan aturan dengan lebih ketat. Selain itu, pendidikan politik yang lebih baik untuk masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan praktik-praktik politik yang tidak sehat dan meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna dalam proses demokrasi.

Yang kedua yaitu untuk meningkatkan demokrasi dalam Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, penting untuk memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum. Reformasi sistem politik yang lebih inklusif dan adil serta peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah mencerminkan kehendak dan kepentingan yang sebenarnya dari seluruh warga Kabupaten Humbang Hasundutan.